

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aris Prio Agus Santoso, (2023). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.

Bantul, Yogyakarta.: PUSTAKABARUPRESS.

Abdurrahman Konoras, (2017). ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

SECARA MEDIASI DI PENGADILAN. Depok: RAJAWALI PERS.

Anthon F. Susanto, (2017). HUKUM dari Consilience ke Paradigma Hukum

Konstruktif-Transgresif. PT. Refika Aditama.

Farid Wajdi, (2023). Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Bisnis, Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah. Jakarta Timur:

Sinar Grafika.

H. Sudiarto, (2015). NEGOSIASI, MEDIASI, & ARBITRASE PENYELESAIAN

SENGKETA ALTERNATIF DI INDONESIA. Bandung: PUSTAKA

REKA CIPTA.

NIA KURNIATI, (2016). HUKUM AGRARIA SENGKETA PERTANAHAN

PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE DALAM TEORI DAN

PRAKTIK. Bandung: PT. Refika Aditama.

Saim Aksinuddin, (2022). Hukum Pertanahan (Mengurai Kompleksitas Problem

Pertanahan di Indonesia). Malang: Inteligensia Media (Intrans Publishing

Group).

Serlika Aprita, (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Refika Aditama.

Susanti Adi Nugroho, (2015). PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE DAN PENERAPAN HUKUMNYA. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Endrik Safudin, (2018). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE. Malang: Intrans Publishing.

Fuady Munir, (2023). TEORI TEORI DALAM HUKUM AGRARIA. Jakarta: RAJAWALI PERS.

Kurniati Nia, (2016). Hukum Agraria; Sengketa Pertanahan penyelesaian melalui arbitrase dalam teori dan praktik. Bandung: PT Refika Aditama.

Manullang, E. F. (2016). LEGISME, LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM. Jakarta: KENCANA.

Amran Suadi, (2019). PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA, MENAKAR BERACARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. Jakarta: KENCANA.

Efa Laela Fakhriah, (2020). HUKUM ACARA PERDATA (Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jamin, dan Pembaruan Acara Perdata). Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki, (2022). PENGANTAR ILMU HUKUM (EDISI REVISI). Jakarta: KENCANA.

Takdir Rahmadi, (2019). MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENDEKATAN MUFAKAT. Depok: RAJAWALI PERS.

Sutedi Adrian, (2006). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 195–208 dan Pasal 224.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1851.

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Pasal 206–240 dan Pasal 258.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C. SUMBER HUKUM LAINNYA

Abd. Rahman Saleh & Imam Fawaid. (2023). PRESPEKTIF ALIRAN UTILITARIANISME DALAM HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN PEMBERLAKUAN UU CIPTA KERJA Abd. Rahman Saleh 1 & Imam Fawaid 2 1. 4(November), 1–19.

Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.

Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–11.

Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. Sasi, 27(3),

335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>

Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan

Evaluasi Kebijakan). In TheJournalish: Social and Government (Vol. 1,

Issue 1, pp. 33-37).

ANDHYKA MARTA. (2022). IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA

PERTANAHAN MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN

KOTA MEDAN. PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN.

Anugrah Reskiani, M. L. dan H. H. (2016). Kompetensi Mediator Dalam

Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan

Agama Makassar (Tinjauan Teoretis dan Faktual). Jurnal Diskursus Islam,

04(2), 421–436.

ARIZKI, L. M. W. (2022). PENERAPAN PERATURAN MENTERI

AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN

2020 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI

MEDIASI (STUDY DI BPN LOMBOK TENGAH). FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS MATARAM, 33(1), 1–12.

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>

Basyarudin, Arafatus Syahidah, Jessica Devi Shinta Siregar, S. (2025). PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM PERDATA PERTANAHAN DI KELURAHAN BANJAR AGUNG UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 1(4), 148–159. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>

Bisma Aryo Dewanto, Putra Hutomo, A. N. W. (2024). KEPASTIAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK ULAYAT DENGAN TANAH SERTIPIKAT. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3, 2361–2371.

Burlian. (2016). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 Existence Marriage and Legal Separation of Islam and Pasca Go Into Effect UU No. 1 Year 1974. *Ilmu Hukum*, 8(July), 1–23.

Daulay, N. (2025). PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS ORGANISASI ABSTRAK. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 01(02), 517–523.

Dewi, N. N., & Setiasih, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14(1), 67–86.
<https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.256>

Dwidhani Putra, M. H. (2023). Problematika Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Model Resolusi Sengketa Bisnis. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 104.
<https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.44771>

Dzulfikar, A., Panatagama, S., Irvan, M., & Fuadi, N. (2023). Alternatif Dispute Resolution Dengan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Alternative Dispute Resolution With The Principle of Pacta Sunt Servanda in Land Conflict Resolution Mediation. 8(2), 252–272.
<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4214>

Efendi, S., & Yusuf, M. S. (2024). Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Tinjau Dari Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1128–1135.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4513>

Eko Yunianto, S.H., M. . (2023). Penerapan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dalam Keberhasilan Mediasi Perspektif Relasional Sosial di Pengadilan Agama Pasarwajo.

Evita Sari Dalimunthe, K., & Muhammad Syahbudi. (2024). Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik. *Jurnal Research and Education Studies*, 4(1), 11–20.

Fajri Lio Sandika, Tofik Yanuar Chandra, E. K. (2023). PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PERTANAHAN MELALUI MEDIASI. Blantika : Multidisciplinary Jurnal, 1(1), 1–17.

Faniyah, I., & Sumarni, E. (2022). Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'Ah Di Pengadilan Agama Padang Kelas Ia. UNES Law Review, 4(4), 574–583. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.284>

FERNANDA, A. (2021). PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN. In eSkripsi Universitas Andalas (Vol. 75, Issue 17). UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

Firmansyah, M. I. P. (2022). Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung pada masa pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) <https://digilib.uinsgd.ac.id/56908/>

Fitri, W., & Aini, Z. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 277–286.

Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2024). PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(4).

Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsi, S. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 36–48.

Haspada, D. (2019). KEPASTIAN HUKUM SENGKETA HAK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI (APS) oleh. WACANA PARAMARTA: *Jurnal Ilmu Hukum*, 18.

Henry Arya Ardiansyah, Bagus Maulana Ramadhan, Ivan Aditia Putra, Muhamad Nazril Hidayat, & Imam Budiansyah. (2025). Negosiasi dan Teknik Lobi sebagai Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Efektivitas Kolaborasi Antarpihak. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 52–60. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.247>

Hijriah, N. K. (2024). Eksistensi Reforma Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Recital Review*, 6, 1–15. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/26465%0Ahttps://onlinejournal.unja.ac.id/RR/article/download/26465/17700>

Intariani, S., Masese, D., Rahman, S., & Poernomo, S. L. (2023). Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(1), 74–90.

Jayadi, H. (2016). Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa.

KAJU, K. P. S. (2013). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. BADAN PERSEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA.

Kelmaskosu, K. (2024). Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 6(1), 1–18.
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no1.p1-18>

Kurniati, N. (2016). "Mediasi-Arbitrase" Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. Sosiohumaniora, 18(3), 197.

Ladzuardi, I., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020. Karimah Tauhid, 3(6), 6300–6313.

Lompoliu, R. A., Rembang, M. R., & Pasoreh, Y. (2015). Peran Komunikasi Dalam Menyelesaikan Konflik Diantara Remaja Di Desa Sendangan Kecamatan Kakas. E-Journal "Acta Diurna," 4(2), 1–9.

Mah, K. ' A., Khoirruni'mah, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (2021). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Tahun 2019-2021. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(5).
<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7075>

Mangare, S. S. (2024). PROSES PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DAN PERAN BPN MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA

DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN. LEX ADMINISTRATUM,
12(5), 1–12.

Mario Julyano, A. Y. S. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS
KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN
POSITIVISME HUKUM. JURNAL CREPIDO, 01(1), 1–10.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>

Marsella. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan
Pertanahan Nasional. *Penegakan Hukum*, 2(2), 101–107.

Maryam Abdullah, T. S. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi
Diluar Pengadilan. *Journal Hukum Islam*, 4(1), 14–27.
<https://eprints.uny.ac.id/22567/1/Skripsi.pdf>

Muhamad, A., Sinaulan, R. L., & Khalimi, K. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4667–
4676. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>

Muhammad Ilham Rizki, Kristina Sulatri, Y. I. (2022). FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS MEDIASI TERHADAP
SENGKETA DIBIDANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
PASURUAN. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*, 240–248.

Muhammad Rehan Arif, S. (2025). TANTANGAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA SENGKETA TANAH DI PN PDP KELAS 2 B. SAKATO LAW JOURNAL, 3(1), 145–160.

Mukti, D. H. A. (2023). Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde). Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>

Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(2), 177–198. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>

Mutmainna, G. G. M. (2024). Dari Kertas ke Kepastian: Peran Krusial Bukti Surat dalam Konflik Pertanahan. 2024, 1–6.

Ningsih, R. K., Tuasikal, H., & Sorong, U. M. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. 2(1), 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>

Novelina, N., Lumbantobing, G., & Nababan, R. (2025). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]. Jurnal Media Informatika, 6(2), 1044–1050.

Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>

- Nuriyanto. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1551>
- Paramartha, I. M. W. H. (2018). Kekuatan Hukum Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1–13.
- Patawari, L. (2025). IMPLIKASI SIRI' TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE. PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Puspa Kusumojati, M., & Ferry Rosando, A. (2021). Peran Badan Pertanahan Dalam Mereduksi Konflik dan Perkara Sengketa tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 16–34.
- Putra, D. R. (2021). Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 391–410. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/6219>
- Putri, K. D. M. S. (2022). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN. *Jurnal Kertha Wicara*, 11, 1675–1685. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>

Qadari, H. Y. (2022). IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSINYA DI INDONESIA. SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA.

Rahimah, A., Mustaqim, R. A., & Fithria, N. (2024). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH. *Ar Raniry Repository*, 20, 1–21.

Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>

Rara, B., Sizi, C., & Munir, U. (2023). Kebijakan Reforma Agraria Yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*, 6(2), 2020. <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v6i2.57>:<https://ulr.unizar.ac.id/ulr/index>

Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–26.

Rika Destiny Sinaga, R. D. (2023). PIHAK YANG MEMPUBLIKASIKAN MATERI MEDIASI SEBAGAI KRITERIA BENTUK PERBUATAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 09, 1–13.

- Rini, A., & Nur, A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI DESA KADUARA TIMUR SUMENEP MADURA. *REFORMASI*, 8, 120–130.
- Rizal, F. (2022). PERAN MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 17–30.
- Rosiana, junaidi tarigan. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 32–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.101>
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167–179. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/207/158>
- Sagoni, S., Rahmi, & Hijrah, S. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *LEGAL: Journal of Law*, 2(1), 79–90.
- Sahnan, Arba, M., & Wira Pria Suhartana, L. (2019). Authority of the National Land Agency in Settlement of Land Disputes. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 436–450. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714>
- Salinding, M. B. (2013). Dasar Filosofi Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- SAPUTRA, N. (2008). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Gugatan Perceraian Di Peradilan Agama (Issue 1) [UNIVERSITAS AIRLANGGA].
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repository.unair.ac.id/39408/4/4.%2520BAB%25201%2520PENDAHULUAN.pdf&ved=2ahUKEwikwO_jif6NAxWPnGMGHTsEFdoQ-NANegQIHxAI&usg=AOvVaw1o5kXLV114Ts3pMWc9UyVA
- Septiani, D. A. P., & Ratna, E. (2022). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi. *Notarius*, 15(1), 430–439.
- Shahlita Asya, M. Z. Arifin, D. (2022). Peran Badan Pertahanan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(4), 5734–5743.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Dimensi*, 10(2), 49–59.
- Sitorus, M. (2007). Pengaruh Communication, Disposition, dan Bureaucratic Structure Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan (Studi Kasus Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Toba Samosir). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(1), 59–81.
- Sukma, Z. P. R., & Aminah, A. (2024). Kendala yang Dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Batas Tanah. *UNES Law Review*, 6(3), 9572–9583.

Suparman, A., Gadzali, S. S., Aulia, S., & Triyani, O. N. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Elektronik (E-Samsat) di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos*, 7(1), 55–63.

Susanti, C. (2024). TINJAUAN PUSTAKA PERATURAN DALAM MENGATUR JAMINAN HALAL PRODUK MAKANAN [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/69473/>

Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadāu*, 2(1), 76–93.

Tanah, S., Pengadilan, D. I., & Ii, W. K. (2023). Skripsi efektivitas penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di pengadilan negeri wangi-wangi kelas ii.

Usman, U., & Najemi, A. (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>

Vera Finidia Indah¹, Siti Zubaidah², Delfiazi Puji Lestari³, A. U., & Hasanah⁴, Feni Huspita Sari⁵, Emilda Sinar Fatiha⁶, B. (2024). TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(September).

- Wijaya, T., Fakhriah, E. L., & Haspada, D. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia: Analisis Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 36–43.
- Wijiatmawati, N. K. (2014). Kekuatan Hukum Dari Hasil Mediasi Di Pengadilan. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 3–4.
- Yanto, Y. D. (2023). The Effectiveness of Mediation in Resolving Land Disputes at the National Land Agency of Banyumas Distric. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 14(5).
- Yuliana, I. (2023). Mediasi Yang Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Tetapi Menghasilkan Akta Damai. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Yunimar. (2022). Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan. *Jurnal Normative*, 10, hal. 98.